

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN GURU PROFESIONAL DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN KARAKTER

Asriana Kibtiyah*

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
FAI Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
E-mail: alc.indonesia@gmail.com

Abstract: *This article is aimed at discussing the national strategy and policy on education. The substance of the convening of education is the formation of characters makes learners ready to live in a society like a human being civilized and dignified. The purpose of education can be achieved if teachers have the professional skills to be part of a profession that is lived. While the existence of the teaching profession should also get the recognition and support of the Government as policy makers and national education strategies. The policy focuses on the existence of an impartial and teachers become key to the success of national education goals in the short and long term.*

Keywords: *Policy strategy, Teacher Education, Professionalism, Character Education*

Abstrak: *Artikel ini membahas kebijakan dan strategi nasional pendidikan. Substansi diselenggarakannya pendidikan adalah terbentuknya watak, karakter yang menjadikan seseorang pebelajar siap untuk hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya manusia yang beradab dan bermartabat. Tujuan pendidikan dapat tercapai apabila guru memiliki kemampuan profesional yang menjadi bagian dari profesi yang dilakoninya. Sementara keberadaan profesi guru harus juga mendapatkan pengakuan dan dukungan dari Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan strategi pendidikan nasional. Kebijakan yang memihak dan berfokus pada keberadaan guru menjadi kunci keberhasilan tujuan pendidikan nasional dalam jangka pendek maupun jangka panjang.*

Kata kunci: *Strategi kebijakan, Pendidikan Guru, Profesionalisme, Pendidikan Karakter*

*Dosen Prodi PGMI FAI Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

PENDAHULUAN

Sejak peradaban manusia mengenal kebudayaan, profesi guru sebagai tokoh panutan mulai dikenal. Keberadaan guru sebagai simbol kebangkitan manusia yang berbudaya. Pada dasarnya setiap orang adalah guru. Dia menjadi guru diri sendiri dan lingkungannya¹. Istilah bahwa ‘setiap orang adalah guru’ merupakan suatu wujud semangat bagi aktivasi sikap positif seseorang yang cenderung mengajarkan pada kebaikan, dan mencegah orang lain untuk berbuat kerusakan pada diri orang tersebut dan lingkungan dimana dia berada. Selain itu, penyematan predikat ‘guru’ atau seseorang dengan sebutan ‘guru’ menunjukkan penghormatan dan penghargaan atas keluhuran budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang yang dipanggil ‘guru’ tadi.

Keluhuran yang dimiliki oleh guru dapat kita tinjau dari apa dan bagaimana yang dilakukan oleh guru dalam suatu kegiatan bernama pendidikan. Menurut Froebel, pendidikan adalah usaha dengan berbagai alat untuk membangkitkan manusia sebagai makhluk yang sadar, berpikir dan mengerti, agar dengan sadar dan atas kemauan sendiri menjelmakan hukum Tuhan yang apa adanya². Menurut Chamber³ menekankan pendidikan pada aspek mental dan rasionalitas serta pembentukan martabat yang mulia. Sedangkan, Sonhadji⁴ bahwa pendidikan adalah usaha yang harus direncanakan secara matang dalam suatu sistem yang baik. Dari definisi-definisi tersebut, kita bisa melihat betapa posisi guru seolah merupakan ‘wakil’ dari keberadaan Tuhan yang mengajarkan kepada umat manusia agar memiliki kemampuan sadar yang tertinggi. Karena itu, Soemanto & Soetopo⁵ juga menegaskan teori pendidikan oleh Plato bahwa dalam mengembangkan pendidikan hendaknya didasarkan pada empat fakta/kenyataan: (1) psikologi yang menguraikan jiwa dan kepribadian manusia, (2) kemasyarakatan, (3) hubungan antara individu dan masyarakat, dan (4) peradaban manusia berdasarkan ketiga fakta sebelumnya.

Selain itu, mengingat posisi guru yang strategis itulah maka pendidikan karakter bagi para peserta didik menjadi tugas dan tanggung jawab yang melekat pada diri setiap guru. Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan agar proses pendidikan itu juga merupakan proses pembentukan dan pembelajaran karakter. Terdapat asumsi bahwa peningkatan etika dan moralitas dapat dicapai melalui pendidikan. Asumsi ini didukung oleh pemikiran bahwa nilai moral dan akhlak mulia yang didasarkan atas keimanan, kejujuran, keadilan, kemandirian, kesederhanaan, kedisiplinan dan ketaatan pada aturan/hukum yang ditanamkan pada peserta didik di sekolah dapat secara efektif membentuk karakter para lulusannya⁶. Maka melalui tangan-tangan guru yang memiliki keluhuran budi pekerti dan kemuliaan akhlak, akan lahir peserta didik yang memiliki karakter yang sesuai dengan tujuan proses pembelajaran.

¹ Malik Fadjar, dkk, *Menggagas Pendidikan Masa Depan*, (Malang: FKIP UMM, 2002), hal.65

² Wasty Soemanto dan Hendyat Soetopo, *Dasar & Teori Pendidikan Dunia: Tantangan bagi para Pemimpin Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal.34

³ John Chambers, *The Achievement of Education*, (New York: Harper-Row Publisher, 1982), hal.71

⁴ Ahmad Sonhadji, *Manusia, Teknologidan Pendidikan*, (Malang: UM Press, 2013), hal.89

⁵ Wasty dan Hendyat Soetopo..... hal.56

⁶ Ahmad Sonhajdi.... hal.101.

Budi pekerti atau karakter memiliki pengertian sebagai kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain⁷. Ngainun Naim⁸ mengatakan bahwa karakter berkaitan dengan kepribadian (*personality*). Seseorang akan disebut berkarakter (*a person of character*) jika perilaku, sikap, dan tindakannya sesuai kaidah moral.

Dengan memahami betapa tugas dan tanggung jawab guru yang tidak sederhana apalagi menganggapnya sebagai profesi yang bukan utama. Maka sudah barang tentu dalam menyikapi tuntutan atas keagungan sosok guru seperti yang diuraikan di atas haruslah menjadikan asas profesionalisme sebagai landasan bekerja para guru. Sehingga keberadaan guru adalah sebuah profesi yang mulia dan agung. Seorang guru harus mampu menghayati tugasnya sebagai tenaga pendidik, mengerti tugas-tugas yang dibebankan, dan melaksanakannya secara profesional. Akibat dari ketidakprofesionalan dalam bekerja dan ketidakmampuannya bersaing dengan orang-orang yang lebih kompeten akan berdampak pada daya tahan (*survival*) atau keberadaan seseorang sebagai guru.

Hal lain yang harus dipahami bahwa pendidikan adalah dunia yang paling dinamis dan senantiasa berkembang setiap saat, demikian pula halnya dengan guru yang merupakan operator sistem pendidikan. Profil guru dan pendidikannya terus-menerus berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan dan fungsi dalam masyarakat yang mengalami perubahan. Fadjar⁹, menegaskan bahwa guru adalah profesi di dalam masyarakat terbuka harus mampu bersaing dengan profesi-profesi lainnya, karena apabila profesi guru tidak kompetitif akan mengakibatkan matinya profesi tersebut. Profesi guru akan dapat diambil alih oleh sebagian orang yang sebenarnya bukan profesinya. Kondisi seperti ini bisa ditemukan di hampir banyak tempat. Tidak sedikit posisi sebagai guru yang semestinya diisi oleh para lulusan dari ilmu keguruan, tergantikan oleh lulusan selain ilmu keguruan.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah semestinya memiliki program untuk pendidikan dan pengembangan guru. Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan. Sementara itu, bagi para lulusan tersebut yang menjadi guru di satuan-satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengembangan profesionalismenya agar dapat menjawab tantangan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Namun sejumlah kendala dihadapi oleh Pemerintah di dalam melakukan pembinaan dan pengembangan keprofesionalan guru secara berkelanjutan, sehingga pelaksanaan pendidikan budi pekerti menjadi efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dari referensi berupa jurnal penelitian, buku-buku yang relevan, dokumen peraturan, dan sebagainya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Pengumpulan data

⁷ Muhammad Furqon Hidayatullah, *GURU SEJATI: Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas*, (Surakarta: Yuma Pustaka, Cetakan Pertama, 2009), hal.146

⁸ Ngainun Naim, *CHARACTER BUILDING: Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, (Yogyakarta: Ar0Ruzz Media, Cetakan I, 2011), hal.57

⁹ Malik Fadjar, dkk.....hal. 67

dilakukan dengan melakukan identifikasi pembahasan dan mengumpulkan kutipan-kutipan pendapat yang relevan dengan tema penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menguji dokumen satu dengan dokumen lainnya, pendapat satu dengan lainnya dengan analisis lintas referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional

Untuk membahas lebih lanjut ada baiknya diuraikan terlebih dahulu tentang sejumlah kebijakan dan strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah di bidang pendidikan khususnya dalam mewujudkan guru profesional dan dukungan pada pendidikan budi pekerti. Strategi umum pemberdayaan di bidang pendidikan meliputi demokratisasi Pendidikan yang terdiri dari: perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pendidikan untuk semua, pemberdayaan dan pendayagunaan berbagai institusi kemasyarakatan, pengakuan hak-hak masyarakat termasuk hak pendidikan, dan kerjasama dengan dunia usaha/industri. Kemudian kelompok-kelompok Sasaran Khusus, terdiri dari: anak dini usia, penyandang cacat dan berkelainan, anak berkemampuan luar biasa (*gifted*), kelompok anak-anak kurang beruntung, kaum perempuan, masyarakat terpencil, kelompok usia produktif, kelompok usia lanjut.

Kebijakan Pendidikan Keprofesian Guru

Salah satu garis kebijakan yang strategis dilakukan oleh Pemerintah adalah ketika Kelompok kerja (Pokja) Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan melaporkan hasil kerjanya di Kantor BAPPENAS pada Februari 2000, dimana Pokja merekomendasikan tentang sistem karier guru, yaitu: (a) pengelolaan administrasi guru dilakukan secara terintegrasi di bawah satu lembaga atau badan yang menangani administrasi kepegawaian guru dari semua jenjang dan jenis pendidikan; (b) sistem karier guru yang fleksibel yang menunjang mobilitas antarjenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan sistem pendidikan; (c) perluasan jenis jabatan guru hingga meliputi jabatan yang selama ini sudah ada; (d) penerapan sistem promosi dalam karier guru di samping sistem profesi yang sudah ada; (e) promosi jabatan guru perlu dikaitkan dengan penugasan khusus; (f) pengkajian ulang atas dasar angka kredit agar lebih mencerminkan kemampuan profesional guru dan mengurangi frustrasi yang dialami guru; dan (g) penilaian kinerja guru diserahkan pada sekolah atau, paling tinggi, kabupaten/kota, dengan mengacu kepada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Pusat. Selain angka kredit, rekomendasi kepala sekolah dan pengawas serta penilaian orangtua siswa perlu dijadikan pertimbangan penting dalam penilaian kinerja guru.¹⁰

Selanjutnya Djalal dan Supriadi¹¹ melalui Pokja juga merekomendasikan terhadap insentif guru yaitu: (a) peningkatan kesejahteraan guru, (b) perbaikan kesejahteraan guru secara bertahap, (c) pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah

¹⁰ Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, Cetakan I, 2001), hal.114.

¹¹ *Ibid*, hal.115

swasta, (d) tunjangan khusus kepada guru-guru yang bertugas di daerah sulit/terpencil, (e) perlindungan terhadap keutuhan penghasilan yang menjadi hak guru. Melalui forum tersebut selanjutnya lahir PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) yang tergambar pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang terbagi dalam beberapa periode sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar¹², pendidikan guru berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) II periode 1994 – 2019, berfokus pada a) meningkatkan nilai profesi guru, b) peningkatan pendidikan guru sejalan dengan selesainya Pendidikan Dasar (PD) 9 Tahun menuju PD 12 tahun, c) menuju integrasi perguruan tinggi dan pendidikan guru: Pendidikan guru sebagai program pascasarjana, dan d) guru sebagai saintis.

Berdasarkan RPJP III periode 2019 – 2024, Tilaar¹³ menambahkan, bahwa pendidikan guru berfokus pada a) profesi guru memperoleh “dignity” yang tinggi. Guru sebagai Resi, dan b) guru sebagai seorang saintis “plus”, menuntut pendidikannya terintegrasi dengan perguruan tinggi. Pendidikan guru sebagai program pascasarjana penuh. Apabila mencermati RPJP lebih jauh, maka pada saat ini tengah berada pada periode 1994-2019 dimana kebijakan yang berhubungan dengan profesionalisme guru yang telah diimplementasikan:

1. Untuk peningkatan nilai profesi guru, yang telah dilakukan (a) program sertifikasi guru yang memiliki konsekuensi meningkatnya upah dengan standar yang layak; (b) penghargaan atas semua upaya kreativitas guru pada peningkatan kualitas proses pembelajaran; (c) mendorong guru untuk *melek* TI (teknologi informasi) dan dengannya memberi daya dukung pada proses pembelajaran berkualitas dan aktual; dan (d) melatih dan memfasilitasi asas profesionalitas guru pada tugas dan tanggung jawabnya, dan sebagainya.
2. Untuk menuju integrasi perguruan tinggi dan pendidikan guru: Pendidikan guru sebagai program pascasarjana, dimana telah dilakukan (a) menjadikan lembaga pendidikan tenaga keguruan yang semula berwujud institut (IKIP) telah bertransformasi menjadi universitas dengan ke-khas-an masing-masing eks-IKIP; dan (b) keterlibatan LPTK dalam program profesionalisme guru (PPG) untuk memberikan bekal kepada guru-guru yang berlatarbelakang pendidikan non-kependidikan.
3. Untuk rencana guru sebagai saintis, telah ditempuh upaya (a) memasukkan unsur pembelajaran sains ke dalam kurikulum; dan (b) membekali dan memfasilitasi guru untuk menjadi peneliti pada ruang lingkup pekerjaannya melalui penelitian tindakan kelas (PTK) yang akan membentuk pembiasaan guru sebagai saintis.

Tantangan dan Kendala Kebijakan

Meski demikian upaya yang telah dilakukan Pemerintah dengan dibantu unsur-unsur yang terlibat juga sepenuhnya dapat berjalan mulus tanpa kendala. Sebagian kebijakan ada yang dapat berjalan, ada yang separuh berjalan tapi tidak mencapai target atau sasaran, dan ada juga yang berusia pendek dan berganti kebijakan dengan dalih dan alasan yang beragam.

¹² H.A.R. Tilaar, *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan I, 1990), hal. 189.

¹³ *Ibid*, hal.190.

Berikut ini adalah sejumlah kendala yang menjadikan program Pemerintah terhadap pendidikan Indonesia menjadi tidak efektif, yaitu:

1. Pengaruh dan intervensi politik dan hukum.

Nampak jelas ketika era otonomi daerah terbentuk dan sebagian kewenangan pengelolaan pendidikan ditentukan oleh pemerintah daerah setempat yang dengan ragam atmosfer politik antardaerah tidak sama. Hal ini sangat memengaruhi kualitas proses pembelajaran dimana *political willness* ditentukan oleh kepala daerah yang *notabene* adalah politisi yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), Contoh yang (masih) paling hangat adalah tentang keberadaan ujian nasional (UN) dimana setiap daerah akan “berlomba-lomba” untuk mengumumkan (sebagai kebanggaan) tentang prosentase jumlah kelulusannya setiap tahun berikut nilai UN-nya.

Dalam kacamata pemimpin daerah sebagai pengambil kebijakan hal ini merupakan sarana *marketing* untuk meningkatkan citra diri seorang kepala daerah di hadapan pimpinan pusat maupun masyarakat yang dipimpinnya. Meningkatnya prosentase jumlah kelulusan dan nilai UN menjadi amunisi bagi kepala daerah untuk meningkatkan kepercayaan yang pada gilirannya digunakan untuk kampanye pemenangan kedua kalinya.

Belum lagi menyoal tentang perilaku dan respon orangtua terhadap guru. Belum lama terjadi di salah satu daerah dimana ada siswa yang dinilai telah melanggar tata tertib sekolah dan dihukum oleh guru dengan mencubit salah satu bagian tubuh siswa. Dimana orangtua bersama anak/siswa tersebut melaporkan perbuatan guru yang mencubit tadi ke pihak yang berwajib. Maka jadilah si guru ditetapkan sebagai tersangka, didakwa dan dipidana atas tuduhan pasal penganiayaan.

2. Sebaran wilayah yang luas secara geografis.

Luasnya wilayah Nusantara menjadi tantangan sekaligus kendala bagi implementasi program-program yang dinamis seperti bidang pendidikan dan peningkatan sumberdaya manusia. Belum lagi wilayah yang memiliki kontur gunung dan pulau-pulau kecil yang saling berjauhan sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut kesulitan untuk diakses ke luar maupun ke dalam. Akibat dari itu, Pemerintah belum/tidak secara merata membangun infrastruktur atau fasilitas yang memudahkan akses menuju lokasi tersebut.

3. Disparitas kualitas proses pendidikan dan daya dukung

Hal ini juga menjadi kendala yang cenderung menghalangi implementasi program-program dari Pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu hal yang paling nyata adalah perbedaan sebaran jumlah penduduk yang berdampak pada perbedaan jumlah guru, jumlah gedung/fasilitas sekolah, dan sebagainya yang berakibat pada tidaksamaan (disparitas) dalam banyak hal.

Guru dan Pendidikan Karakter

Aktivitas pendidikan sejak awal menjadi cara bertindak dari sebuah masyarakat untuk melanggengkan warisan budayanya kepada generasi yang lebih muda melalui nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Jika pewarisan tidak terjadi maka nilai-nilai dan kebudayaan yang telah hidup di masyarakat akan punah dengan kematian para

anggota masyarakatnya.¹⁴ Maka melalui pendidikan yang dihidupkan dalam pola pendidikan karakter maka proses pewarisan itu berlangsung. Sementara itu, keberadaan pendidikan karakter sebenarnya sudah dikenal cukup lama yakni pada masa sebelum masehi. Bisa uraikan secara sepintas pendidikan karakter di era abad-abad awal.

1. Pendidikan Karakter Aritrokratis ala Homeros

Pada masa ini menurut Homeros (pujangga Yunani), gambaran manusia ideal tampil dalam gambaran diri pahlawan yang tegas dimana disebutkan sebagai manusia yang baik (berkeutamaan). Jadi idealnya manusia adalah menjadi manusia yang baik (*aner agathos*). Didalam keyakinan masyarakat Homerian bahwa manusia yang baik itu yang memiliki ciri-ciri, seperti, berasal dari keluarga bangsawan, memiliki kualitas penampilan fisik, sukses dan terkenal tanpa cacat. Ia harus memiliki kegemilangan keberanian dan memperoleh kemenangan dalam perang, harus kuat, besar, dan tampan, harus dapat berbicara dengan baik di dalam permusyawaratan dan memberikan nasehat yang masuk akal, juga harus kaya dan berkuasa. Inilah yang disebut Homeros sebagai manusia yang memiliki *arete*.

2. Pendidikan Karakter Populer dalam Hesiodos

Berbeda dengan Homeros, Hesiodos menciptakan teogoni Yunani yang menggambarkan sosok *arete* yang berbeda. Menurutnya, untuk menjadi *areta* tidak dibatasi oleh kebangsawanan, tapi justru dapat disempurnakan oleh kerja keras dengan cucuran keringat yang dilakukan oleh kaum bawah (proletar). Sikap kesederhanaan dan pergumulan hidup di kehidupan sehari-hari, menurut Hesiodos lebih memiliki kemuliaan daripada sekedar memenangkan di meda peperangan.

3. Pendidikan Karakter Patriotis Spartan

Pada masa ini pendidikan karakter bagi warga negara diarahkan pada pertumbuhan keutamaan moral sabagai warga negara yang memiliki cinta secara total pada tanah air, menghargai nilai kekuatan dan kekerasan, mengutamakan latihan fisik demi kesiapan tempur, dan ketaatan total pada tanah air (*patria*).

Ideal *arete* serdadu telah dikenalkan oleh Tirteo yang hidup pada paruh kedua abad ke-7 SM. Tirteo mengubah *arete* homerian menjadi kepahlawanan *amor patrio* (cinta tanah air).

4. Pendidikan Karakter Pendidikan Karakter Retoris ala Athena

Pada masa ini merupakan kejayaan bidang tata sosial politik dan seni, sehingga demokrasi merupakan tempat untuk mengekspresikan diri di ruang publik. Dengan menyampaikan gagasan untuk memengaruhi opini publik. Hidup secara aktif dalam masyarakat yang demokratis berarti ikut dalam majelis rakyat, berbicara di depan publik, teknik bicara, teknik retorika dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini, pendidikan karakter merupakan persiapan bagi individu untuk memasuki kehidupan politik, terutama mendidik untuk menjadi orator ulung. Untuk itu peran sofis sangat penting dalam proses pendidikan ini. Sofis adalah orang yang memiliki kebijaksanaan

¹⁴ Doni A. Kesoema, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal.79

atau berposisi sebagai guru kebijaksanaan. Dalam era ini bahwa pengetahuan manusia bersifat transformatif bukanlah monopoli kalangan bangsawan dan aristokrat.

5. Masa Socrates, “Kenalilah dirimu sendiri”

Pada era ini, pendidikan karakter di Athena memiliki nuansa baru ketika Socrates (470-399 SM) menemukan apa yang disebut sebagai ‘jiwa’ sebagai hal yang sentral dalam hidup manusia. Memelihara ‘jiwa’ inilah yang semestinya menjadi tujuan pendidikan agar manusia tetap memiliki kualitas dan keutamaan yang menjadi ciri khas hakikinya.

Paradigma Socrates yang terkenal adalah “kenalilah dirimu sendiri”. Mengenali diri sendiri berarti juga ‘memelihara jiwa’ kita. Memahami diri sendiri bukan sekedar berarti hanya mengenali nama, melainkan lebih dari itu yaitu mengenali dimensi interioritas (moral) sebagai manusia. Karena dengan interioritasnya berusaha merealisasikan dirinya melalui nilai-nilai rohani. Pendidikan masa Socrates merupakan sebuah pendidikan jiwa bagi bertumbuhnya nilai-nilai etis dalam diri manusia sebab cara itulah manusia menumbuhkan dan memelihara jiwanya.

6. Masa Plato, “Mencetak seorang filsuf pemimpin”

Menurut Plato, pendidikan memiliki fungsi esensial untuk memimpin manusia pada keutamaan. Mereka yang menjalani pendidikan hanya untuk mengejar sukses, rasa hormat, apalagi popularitas dikatakan sebagai sebuah pendidikan yang tingkatannya rendah. Tujuan pendidikan bagi Plato adalah membawa manusia pada kehidupan kontemplatif, yaitu saat terjadi kesatuan antara apa yang ‘baik’ dan yang ‘benar’.

7. Pendidikan Karakter Kosmopolitan Hellenis

Pada masa ini merupakan era humanitas Latin, setelah dari era *Paidela* Yunani. Pendidikan ala humanitas tidak bersifat parsial, segmentaris dan tertutup pada kebudayaan sendiri, melainkan bersifat ekumenis, yaitu setiap individu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bertumbuh melalui kehadiran kebudayaan dan kultur lain yang berbeda dengan kebudayaan dan kultur yang telah mereka miliki.

Kebudayaan Hellenis ini disebut sebagai model humanisme klasik yang meletakkan manusia pada posisinya yang paling tinggi. Pendidikan karakter di masa ini merupakan sebuah usaha untuk pendidikan manusia secara integral dan utuh demi pertumbuhan dan kesempurnaan manusia itu sendiri, bukan demi kepentingan orang lain, demi kepentingan politik.

8. Pendidikan Karakter *ala* Romawi

Pendidikan karakter di Roma terbentuk melalui keluarga dengan cara menghormati apa yang disebut *mos maiorum* dan sistem *pater familias*. *Mos maiorum* merupakan sebuah rasa hormat atas tradisi yang telah diberikan oleh leluhur. Pendidikan karakter mestinya mempertimbangkan unsur tradisi ini sehingga tradisi leluhur yang baik tetap dapat dihayati dihormati sebagai norma tingkah laku dan cara berpikir.

Unsur-unsur elemen peradaban Roma yang menjadi materi dasar bagi pembentukan karakter adalah nilai-nilai seperti, mengutamakan kebaikan tanah air,

devosi (*la pietas*), kesetiaan (*la fides*), perilaku bermutu (*la gravitas*), dan stabilitas (*la constantia*).

9. Pendidikan Karakter Kristiani

Ada beberapa ide kitab suci Bible yang mengukuhkan pendidikan Kristiani mengatasi perkembangan dan kemajuan pendidikan Romawi dan Yunani. Beberapa unsur tersebut antara lain, keyakinan akan keesaan Tuhan (monoteisme), paham tentang penciptaan, penekanan pada manusia (antroposentris, menentang kosmosentris Yunani), Allah yang sifatnya monoteisme (Allah yang memberikan hukum moral di dalam hati manusia), *eros* Yunani menjadi *agaphe* kristiani, paham tentang rahmat, revolusi nilai yang dibawa oleh Sabda Bahagia Yesus, immortalitas Yunani yang berubah menjadi paham tentang kebangkitan kristiani, pemahaman makna baru tentang sejarah dan hidup manusia dalam terang rencana penyelamatan Allah.

10. Pendidikan Karakter Modern

Pendidikan karakter pada masa modern merupakan tanggapan dan reaksi atas model pendidikan yang berkembang sejak abad pertengahan. Beberapa peristiwa yang memengaruhi perkembangan pendidikan karakter modern antara lain;

a. Gerakan renaisans

Gerakan ini muncul pada paruh kedua abad ke-14 yang merupakan gerakan kultural yang mencoba melepaskan diri dari kungkungan abad pertengahan yang didominasi pemahaman religius-teologis.

b. Arus pemikiran positivisme.

Pemikiran ini mengukuhkan determinisme dan materialisme. Pemikiran ini menegaskan tahap baru perkembangan umat manusia, dari masa teologis-spiritual ke masa teknis-material. Pengaruhnya terhadap pendidikan menganggap pendidikan sebagai sebuah fakta alamiah yang melepaskan dimensi transendental dan kerohanian manusia,

c. Naturalisme pendidikan.

Menghasilkan Revolusi Kopernikan dalam pedagogi. Revolusi ini ditandai kembali dengan ditemukannya ‘anak-anak’ dalam pedagogi. Dulu anak-anak dianggap makhluk kecil yang dipersiapkan untuk menjadi manusia dewasa, sehingga memaksakan gambaran dan cita-cita orang dewasa ke dalam otak anak-anak.

11. Pendidikan Karakter F.W. Foester

Pendidikan karakter pertama kali dicetuskan oleh pedagog Jerman F.W. Foester (1869-1966), dimana pendidikan yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi merupakan reaksi atas keterbatasan pedagogi natural Rousseauian dan instrumentalisme pedagogis Dewey.

Tujuan pendidikan menurut Foester adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial antara subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Kekuatan karakter seseorang dalam pandangan Foester ada empat ciri yaitu: keteraturan interior, koherensi, otonomi, dan keteguhan dan kesetiaan. Dalam

konteks keindonesiaan, pendidikan karakter sudah coba dicontohkan oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan sejak awal. Pada masa orde baru menjadikan Pancasila dijadikan sebagai acuan utama untuk pembentukan karakter bangsa. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana pembelajaran Pancasila melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan forum sosialisasi dan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di berbagai sekolah dan kampus serta lembaga-lembaga lainnya.

Pembelajaran karakter dari waktu ke waktu memang membutuhkan peran guru yang akan memandu dan mengajarkannya kepada peserta didik untuk menjadi insan yang berkarakter dan berbudi pekerti. Pendidikan budi pekerti memang timbul tenggelam dalam kurikulum pendidikan nasional kita. Adakalanya pendidikan budi pekerti menjadi primadona, menjadi pelajaran khusus dan kemudian menjadi dimensi yang menyerambahi seluruh mata pelajaran agama, pendidikan moral Pancasila, atau pendidikan akhlak mulia.¹⁵

Sementara itu, guru sebagai sosok penting dalam pendidikan karakter disebabkan oleh keberadaannya sebagai figur sentral dalam pendidikan. Guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar, memiliki ruang untuk dikondisikan dan diarahkan, yaitu ruang kelas tempat ia dan peserta didik berinteraksi. Kelas adalah tempat yang memungkinkan dan memiliki keleluasaan bagi guru membangun interaksi yang intim dengan peserta didik. Karena itu kelas dan sekolah harus menjadi tempat yang inklusif bagi siapapun terutama dalam membangun karakter. Menurut Eko Prasetyo¹⁶, dengan gaya hidup yang eksklusif maka sulit bagi guru untuk membangun interaksi lebih intim serta mendalam kepada muridnya. Jadi diperlukan pula lingkungan dan tujuan mengapa sebuah sekolah itu dibangun atau diselenggarakan. Artinya, keberadaan sekolah tidak melulu hanya mendorong dan mengajarkan para peserta didik untuk belajar keterampilan teknis dan pengetahuan (ranah kognitif) saja. Tetapi juga membangun karakter dan mental individu peserta didik. Bisa jadi kekusaran sebagian guru membangun karakter karena sekolah memang bukan tempat untuk membangun karakter atau watak melainkan mengunggulkan keterampilan teknis dengan ukuran yang sudah ditetapkan¹⁷

Pada awalnya, menurut T. Raka Joni¹⁸ penelitian tentang pembelajaran itu dipusatkan kepada karakteristik pendidik khususnya ciri-ciri kepribadiannya, seperti kepedulian kepada pebelajar, kepemilikan rasa humor, antusiasme dalam mengajar, kebiasaan bersikap adil dan kecakapannya dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan sebagainya yang kesemuanya didasarkan atas persepsi pebelajar. Menyusul setelah itu, perhatian tidak lagi ditujukan kepada karakteristik pendidik melainkan kepada penerapan berbagai metode pembelajaran yang dikaitkan dengan perolehan belajar dalam kerangka pikir paradigma proses-produksi.

Atas uraian analisis di atas, terdapat faktor-faktor yang saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dipandang sangat menentukan arah kebijakan pendidikan

¹⁵ *Ibid*, hal.80

¹⁶ Eko Prasetyo, *Guru: Mendidik adalah Melawan!*, (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hal.79

¹⁷ *Ibid*, hal.81

¹⁸ T. Raka Joni, *Resureksi Pendidikan Profesional Guru*, (Malang: LP3UM-Cakrawala Indonesia, 2008), hal.233

nasional. Dalam kaitan tersebut, peneliti memberikan wacana solusi bagi Pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan nasional untuk masa mendatang.

Pendidikan karakter mulai mencuat hangat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2010 silam. Tekad pemerintah untuk menjadikan pengembangan karakter dan budaya bangsa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional harus didukung secara serius. Tekad tersebut dirasakan semakin kuat ketika Pemerintahan yang sekarang di bawah Presiden Joko Widodo mencanangkan revolusi mental sebagai *platform* pada keseluruhan bidang, terutama di bidang pendidikan.

Di berbagai negara, pendidikan menjadi kekuatan negara tersebut dalam membangun karakter bangsa. Hal ini selaras seperti yang dikatakan Mu'in¹⁹ bahwa karakter bangsa hanya semata dapat dibentuk dari program pendidikan atau proses pembelajaran di dalam kelas. Akan tetapi, kalau memang pendidikan bermaksud serius untuk membentuk karakter generasi bangsa, ada banyak hal yang harus dilakukan, butuh kesadaran terhadap para pendidik dan pelaksana kebijakan pendidikan. Apabila digambarkan lebih lanjut, berkenaan dengan pendidikan karakter ini dan kaitannya dengan keberadaan guru, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kebijakan dan Strategi Pemerintah

Pemerintah dengan segala kekuasaan yang dimilikinya berhak untuk mengeluarkan kebijakan apapun yang bersifat strategis maupun teknis. Di bidang pendidikan hendaknya Pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah raksasa berkenaan dengan pendidikan karakter bangsa melalui dunia pendidikan yang dinilai paling strategis.

Beberapa kebijakan yang terkait dengan itu antara lain: (a) standarisasi guru profesional; (b) peningkatan anggaran pendidikan secara nasional; (c) perbaikan dan pemerataan mutu pendidikan; (d) peningkatan fasilitas pendidikan di seluruh daerah; (e) peningkatan hubungan antarnegara dalam hal peningkatan kualitas pendidikan nasional; (f) program keterserapan lulusan pendidikan ke dunia kerja di sektor formal dan non-formal; (g) perwujudan sumbangsih setiap perguruan tinggi kepada dunia industri nasional; dan sebagainya.

2. Guru Profesional

Kebijakan dan strategi di bidang pendidikan oleh pemerintah yang dikeluarkan hendaknya bermuara pada kekuatan guru, karena pada guru-lah semua permasalahan dan solusi jalan keluar bertumpu. Guru menjadi aktor sentral pendidikan kita, karena dia adalah orangtua kedua bagi siswa. Guru harus diberi keleluasaan mengelola proses pembelajaran dengan siswa termasuk evaluasi dan penilaiannya serta menentukan kelulusannya.

Guru profesional akan mendorong kemandirian guru untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diembannya. Sejumlah kebijakan Pemerintah menuju terwujudnya guru profesional antara lain: (a) kurikulum nasional yang luwes; (b) sertifikasi nasional oleh badan independen yang terakreditasi; (c) penilaian kinerja

¹⁹ Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz, Cetakan I, 2011), hal.44

guru secara periodik; (d) Undang-undang Guru yang berpihak pada profesionalisme; (e) pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/ kota) yang berpihak pada pendidikan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia; (f) Aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pejabat sektoral daerah (Kepala Dinas) yang mendukung pendidikan di daerah; dan sebagainya.

Sementara itu menurut Soedijarto²⁰ untuk meningkatkan kemampuan profesional guru diupayakan dengan cara: (1) merancang program pembelajaran termasuk menyusun silabus, (2) melaksanakan, memimpin, mengelola dan menilai program pembelajaran, (3) mendiagnosis masalah dan hambatan yang dihadapi oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan menguasai kompetensi yang ditetapkan, dan (4) menyusun berbagai pilihan yang harus dikembangkan untuk membantu mereka, tidaklah mudah. Kiranya perlu diketahui bahwa penguasaan keempat gugus kemampuan profesional perlu ditunjang oleh penguasaan berbagai pengetahuan berbagai pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan: (1) karakteristik peserta didik; (2) ilmu pengetahuan sebagai obyek belajar dan *ways of learning* atau *mode of inquiry*; (3) hakikat tujuan pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik; (4) teori belajar umum dan khusus; (5) model-model pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi; (6) teknologi pendidikan; dan (7) sistem dan teknik evaluasi.

3. Implementasi Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter ini harus diupayakan untuk mengatasi masalah yang belakangan sering berkembang.²¹ Beberapa masalah yang dihadapi oleh bangsa ini antara lain: (a) kemiskinan dan keterbelakangan yang menyebabkan negara kita tertinggal jauh dari negara lain; (b) konflik dan kekerasan atas nama klaim kebenaran palsu dan sempit yang menyebabkan sentimen antarkelompok meningkat; (c) dominasi budaya membodohi akibat pengaruh tayangan media (terutama televisi); (d) adanya korupsi yang meluas dan masih menggerogoti bangsa ini; (e) kerusakan lingkungan alam akibat gejala alam maupun akibat ulah manusia; dan (f) ketimpangan dan penindasan yang bernuansa gender atau terpinggirnya kaum perempuan.

Untuk menghadapi isu masalah tersebut, Mu'in²², mengusulkan yang dapat dilakukan melalui pendidikan karakter, yaitu antara lain:

a. Pendidikan Sosialis, Ilmiah dan Demokratis.

Model ini diharapkan akan mengembalikan pentingnya berbagi dan bekerja keras untuk memacu produktivitas yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

b. Pendidikan multikultural.

Model ini telah banyak diakui sebagai model yang tidak boleh ditinggalkan karena bangsa ini adalah bangsa yang multikultur. Berdasarkan kenyataan sejarah Indonesia maka keberadaan pendidikan multikultural sangat diperlukan. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para

²⁰ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hal. 89

²¹ Mu'in....*ibid.*, hal. 58

²² *Ibid*, hal. 70

siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, klas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar porses belajar menjadi efektif dan mudah.²³

c. Pendidikan Karakter melalui peningkatan budaya literasi (budaya bacatulis).

Budaya baca tulis dinilai sangat rendah di kalangan generasi muda. Padahal membaca menulis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan transfer pengetahuan, pengayaan kosa kata sebagai pintu masuk menjelaskan dunia.

d. Pendidikan anti korupsi.

Pendidikan karakter anti korupsi ini berisi tentang bagaimana anak-anak belajar untuk jujur, menghargai bahwa hasil adalah akibat proses, dan dampak ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan bagi orang lain.

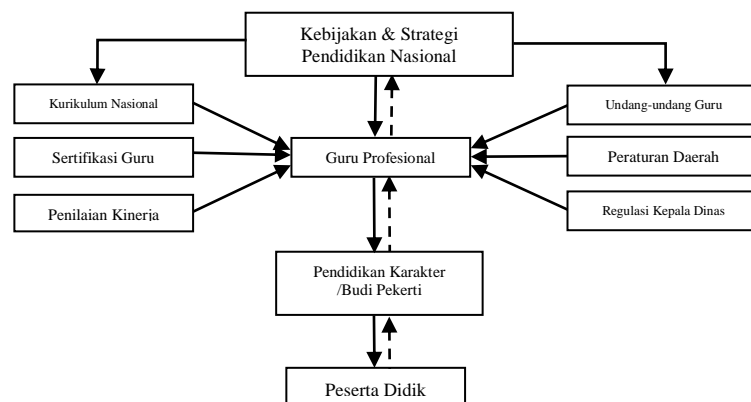
e. Pendidikan lingkungan hidup.

Pendidikan ini mendesak untuk dilakukan mengingat fakta bahwa lingkungan alam dan bumi yang terancam menuju kehancuran. Perubahan iklim yang tak terduga dan tidak menentu ini merupakan gejala anomali alam yang diduga akibat kerusakan lingkungan. Munculnya bencana banjir, tanah longsor, dan sebagainya yang memakan korban manusia ratusan hingga ribuan di banyak tempat cukup menjadi bukti akan kerusakan alam yang tengah terjadi.

f. Pendidikan berperspektif Kesetaraan Gender.

Pendidikan ini sangat bermanfaat untuk menjadikan kaum perempuan sebagai tenaga produksi masyarakat yang dapat berperan secara sama dengan laki-laki, tak ada bangsa tanpa peran perempuan.

Selanjutnya untuk memperjelas hubungan antara kebijakan pemerintah, guru profesional dan pendidikan karakter, dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar: Hubungan antarfaktor

Implikasi Penelitian

Dari uraian pembahasan di atas, penulis menekan terhadap implikasi dari penelitian ini, yaitu (1) perlunya mengembalikan lagi lembaga yang menghasilkan tenaga pendidik/guru yang memiliki sistem seleksi yang memiliki standard kepastan

²³ A.M. Abdullah, *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hal 83

sebagai guru sejak awal menjadi mahasiswa kependidikan; (2) perlunya perubahan kurikulum yang lebih simpel dan tidak banyak muatan yang berkaitan dengan kebijakan lainnya, misal, ada gerakan anti korupsi maka sekolah diminta untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran anti korupsi, dan sebagainya; (3) pemantapan jalur PPG atau wajib sertifikat/akta mengajar bagi sarjana non-kependidikan yang berkiprah di dunia pendidikan khususnya sekolah; (4) proses menjadi guru atau manajemen sekolah, sejak awal sudah dipetakan kemampuan berdasarkan potensi dan minat ketika kuliah di perguruan tinggi kependidikan. Mereka yang berpotensi menjadi pengelola sekolah akan dibekali kemampuan manajemen pendidikan dan satuan pendidikan benar, sedangkan mereka yang menyukai dunia mengajar juga akan dibekali kemampuan teknik mengajar dan kreativitas menyusun media ajar dengan benar dan tepat; dan (5) menata kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

Sejumlah hal tersebut di atas merupakan hal yang dianggap mendesak agar guru dapat mewujudkan sikap profesionalismenya sebagaimana profesi lain.

KESIMPULAN

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki peranan yang sangat strategis. *Attitude* (sikap dan perilaku) dengan berkualifikasi ahli, terampil, kreatif, inovatif merupakan indikator pendidikan manusia yang bermutu.

Keterbelakangan disebabkan oleh rusaknya karakter bangsa yang kian memprihatinkan. Salah satu faktor utamanya adalah adanya kepemimpinan bangsa yang tak dapat melakukan pembangunan karakter. Para pendidik diharapkan menjadi *goal keeper* pendidikan karakter, malah banyak yang menunjukkan kerusakan karakter mulai korupsi, kekerasan terhadap siswa, pencabulan terhadap siswa hingga ramai-ramai melakukan tindakan kecurangan dan mendustai kejujuran pada kasus ujian nasional.

Menjadi semakin penting kehadiran guru profesional dalam mewujudkan pendidikan karakter yang nyata bukan teori di kelas-kelas pembelajaran yang membangkitkan emosi dan memantik kecerdasan setiap siswa. Demikian pula halnya dengan guru yang dituntut tidak cuma mengajarkan karakter kepada peserta didiknya, tapi juga mewajibkan karakter yang diajarkan harus menjadi bagian dari dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. M. *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*. (Yogyakarta: Pilar Media. 2007).
- Ali, Muhammad. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Cet.XII. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000)
- Assegaf, Abd. Rahman. *Politik Pendidikan Nasional*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005)
- Chambers, J. *The Achievement of Education*. (New York: Harper & Row Publisher, 1982)

- Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Edisi I Cetakan I. (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1982)
- Fadjar, H.A. Malik, dkk. *Menggagas Pendidikan Masa Depan*. (Malang: FKIP-Universitas Muhammadiyah Malang, 2002)
- Hidayatullah, Muhammad Furqon, *GURU SEJATI: Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas*. Cetakan Pertama. (Surakarta: Yuma Pustaka, 2009).
- Joni, T. Raka. *Resureksi Pendidikan Profesional Guru*. (Malang: LP3UM – Cakrawala Indonesia, 2008)
- Koesoema A., D. *PENDIDIKAN KARAKTER: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT Grasindo, 2007)
- Mu'in, Fatchul. *PENDIDIKAN KARAKTER: Konstruksi Teoretik & Praktik*. Cetakan I. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- Naim, Ngainun. *CHARACTER BUILDING: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*. Cetakan I. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- Prasetyo, Eko. *Guru: Mendidik adalah Melawan!* .(Yogyakarta: Resist Book, 2006).
- Seputra, Yulius Eka. *Manajemen dan Perilaku Organisasi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008)
- Soemanto, Wasty; Soetopo, Hendyat, *Dasar & Teori Pendidikan Dunia: Tantangan bagi para Pemimpin Pendidikan*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)
- Sonhadji, Ahmad. *Manusia, Teknologi dan Pendidikan: Menuju Peradaban Baru*. (Malang: UM Press, 2013).
- Tilaar, H.A.R. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*. Cetakan I. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)